

---

---

## BAB V

### RENCANA PROGRAM dan KEGIATAN

#### 5.1. Rencana Program

Program-program pengawasan dan pembinaan menyesuaikan dengan Program-program untuk mencapai Sasaran-sasaran pada Misi Inspektorat, yang telah disesuaikan dengan tujuan dan sasaran Inspektorat, program-program tersebut adalah sebagai berikut :

**1. Sasaran Misi 1: Menyelenggarakan pengawasan internal secara profesional terhadap tata kelola pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah, dengan sasaran Inspektorat yang ingin dicapai adalah :**

- a. Meningkatnya kinerja urusan wajib dan pilihan sesuai standar pelayanan minimal;
- b. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan administrasi umum pemerintahan;
- c. Meningkatnya peran pengawasan intern dalam melakukan pemeriksaan dan pembinaan pengelolaan keuangan dan barang daerah;
- d. Meningkatnya kualitas reviu LKPD dan asistensi LKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

**2. Sasaran Misi 2 : Meningkatkan peran pembinaan (konseling) aparat pengawasan internal dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah.**

**Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah, dengan sasaran Inspektorat yang ingin dicapai adalah :**



- a. Meningkatnya peran pengawasan dalam pembinaan dan evaluasi laporan kinerja instansi pemerintah tingkat OPD dan Kabupaten/Kota;
- b. Meningkatnya pembinaan dalam penerapan sistem pengendalian intern pemerintah;
- c. Meningkatnya nilai kualitas pelaksanaan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi dan penanganan pengaduan masyarakat/evaluasi pelayanan public.

**3. Sasaran Misi 3 : Meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme aparatur dan kapasitas pengawas internal yang didukung oleh sistem informasi pengawasan yang akurat dan optimal.**

**Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan sasaran Inspektorat yang ingin dicapai :**

- a. Dipenuhinya kualitas dan kuantitas aparat pengawasan yang optimal untuk pengawasan internal.

## **5.2. Rencana Kegiatan**

Kegiatan merupakan penjabaran dari program pengawasan dan pembinaan, yang memiliki dimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Kegiatan yang bersifat tahunan ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi program kerja operasional Inspektorat yang berdimensi lima tahunan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah :

***1. Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Evaluasi pada OPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.***



Indikator Outcome :

Tersedianya dokumen hasil pengawasan yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan.

Indikator Kinerja :

- a) Pemeriksaan Kinerja dan Pengelolaan Keuangan pada Entitas Provinsi dan Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota, yang meliputi:
  - 1) Pemeriksaan Kinerja dan Pengelolaan Keuangan pada OPD Provinsi.
  - 2) Pemeriksaan Bantuan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- b) Reviu Laporan Keuangan Provinsi Jawa Barat
- c) Pemeriksaan Khusus atas Permintaan Pimpinan (*Pemeriksaan On Call*)
- d) Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Entitas Provinsi Jawa Barat.
- e) Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada 10 Kabupaten/Kota

Kelompok Sasaran :

- a) Organisasi Perangkat Daerah Provinsi
- b) Badan Usaha Milik Daerah
- c) Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat

**2. Kegiatan Pemutakhiran Data dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri, Itjen Kementerian lainnya, Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan BPK RI.**

Indikator Outcome :

Dimanfaatkannya kegiatan pemutakhiran sebagai sarana memperbaiki dan menyelesaikan permasalahan Auditan

Indikator Kinerja :

- a) Kegiatan pemutakhiran data hasil pemeriksaan Inspektorat pada OPD Provinsi.



- b) Kegiatan pemutakhiran data hasil pemeriksaan Inspektorat pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c) Kegiatan pemutakhiran data hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri dan Kementerian lainnya.
- d) Fasilitasi Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan BPKP

Kelompok Sasaran :

- a) Organisasi Perangkat Daerah Provinsi.
- b) Badan Usaha Milik Daerah.
- c) Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

**3. Kegiatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (EKPPD) dan OPD Provinsi**

Indikator Outcome :

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Indikator Kinerja :

- a) Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) Pemerintah Kabupaten/Kota.
- b) Pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c) Pengkajian dan analisis kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat

Kelompok Sasaran :

Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

**4. Kegiatan Desk Akuntabilitas Pemerintah Provinsi Jawa Barat**

Indikator Outcome :

- a) Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
- b) Penurunan jumlah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan



Indikator Kinerja :

- a) Pembahasan perbaikan opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- b) Pembahasan pembinaan temuan berulang dari APIP.
- c) Pembahasan upaya perbaikan sistem atas modus operandi kasus.
- d) Pembahasan upaya peningkatan kinerja OPD hasil monitoring dan evaluasi kinerja dari Biro Administrasi Pembangunan, Bappeda dan Inspektorat.

Kelompok Sasaran :

OPD Provinsi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

**5. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Provinsi Jawa Barat**

Indikator Outcome :

- a) Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota.
- b) Keterbukaan informasi publik.

Indikator Kinerja :

Monitoring dan Evaluasi RAD-PPK Pemerintah Kab/Kota & Provinsi yang meliputi :

- a) Sistem pelayanan publik berbasis TI dengan fokus pada :
  - 1) Pemda di seluruh Provinsi dengan memperhitungkan integrasi internal kelembagaan yang telah memiliki target jelas sampai 2014, dengan fokus pada pemberian perizinan dengan rencana aksi :
    - (a) Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) (Bagi Pemerintah Daerah yang belum membentuk kelembagaan PTSP), dengan ukuran keberhasilan :
      - (1) Ditetapkan SK Gubernur tentang Tim Pembentukan Kelembagaan PTSP;
      - (2) Tersusunnya rancangan Perda Kelembagaan PTSP



- 
- (3) Disepakati Rancangan Perda tentang Pembentukan Kelembagaan PTSP antara DPRD dengan Pemerintah Daerah;
  - (4) Ditetapkannya Perda tentang Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi.
- (b) Pelimpahan Kewenangan penerbitan Perizinan dan non perizinan di daerah kepada lembaga PTSP, dengan ukuran keberhasilan :
- (1) Tersusunnya inventarisasi data izin -izin yang ada di SKPD
  - (2) Tersusunnya rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pelimpahan kewenangan Perizinan dan non Perizinan di daerah kepada Lembaga PTSP
  - (3) Ditandatanganinya Peraturan Kepala Daerah tentang Pelimpahan Kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga PTSP
  - (4) Disosialisasikan Peraturan Kepala Daerah tentang Pelimpahan Kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga PTSP
- (c) Publikasi standar pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga PTSP, dengan ukuran keberhasilan :
- (1) Tersusunnya desain publikasi standar pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga PTSP
  - (2) Terpublikasikannya standar pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga PTSP
  - (3) Tersusunnya laporan kegiatan pelaksanaan publikasi standar pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga PTSP



- 
- (d) Penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan pengaduan layanan PTSP dengan ukuran keberhasilan :
- (1) Diterbitkannya SK Gubernur tentang mekanisme penanganan pengaduan layanan PTSP
  - (2) Tersusunnya desain mekanisme penanganan pengaduan layanan PTSP
  - (3) Tersedianya sarana dan mekanisme penanganan pengaduan layanan PTSP
- 2) Keterbukaan informasi dalam penanganan perkara (termasuk perkara korupsi), perencanaan, dan penganggaran dengan rencana aksi yang dimonitoring :
- a) Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah, dengan ukuran keberhasilan :
- (1) Terlaksananya rapat koordinasi terkait persiapan peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah
  - (2) Terbentuknya website resmi Pemerintah Provinsi dan menyiapkan menu konten dengan nama "transparansi pengelolaan anggaran daerah"
  - (3) Tersusunnya data muktahir dan informasi tentang data Ringkasan RKA-SKPD, Ringkasan RKA-PPKD, Ranperda tentang APBD, Perrda tentang APBD, RanPerda tentang Perubahan APBD, Perda tentang Perubahan APBD, Ringkasan DPA-SKPD, Ringkasan DPA-PPKD, LRA seluruh SKPD, LRA- PPKD, LKPD yang sudah audit, opini atas LKPD
  - (4) Terpublikasinya Ringkasan RKA-SKPD, Ringkasan RKA-PPKD, Ranperda tentang APBD, Perrda tentang APBD, RanPerda tentang Perubahan APBD, Perda tentang Perubahan APBD, Ringkasan DPA-SKPD, Ringkasan



---

DPA-PPKD, LRA seluruh SKPD, LRA- PPKD, LKPD yang sudah audit, opini atas LKPD melalui website masing-masing Pemda.

- b) Publikasi dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah, dengan ukuran keberhasilan :
- (1) Tersusunnya rancangan materi publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana satuan kerja perangkat daerah
  - (2) Tercetaknya materi publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana satuan kerja perangkat daerah
  - (3) Dipublikasikannya dokumen rencana pembangunan daerah serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui media massa, web site.
  - (4) Tersusunnya laporan kegiatan pelaksanaan publikasi dokumen rencana pembangunan daerah serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui website.
- c) Pelaksanaan Transparansi Proses Pengadaan Barang dan Jasa, dengan ukuran keberhasilan :
- (1) Tersusunnya SK Gubernur tentang pembentukan Tim Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang dan jasa
  - (2) Tersusunnya daftar inventarisasi Rencana Umum Pengadaan Barang dan jasa
  - (3) Tersusunnya draft kebutuhan rencana umum pengadaan barang dan jasa
  - (4) Ditetapkannya dan dipublikasikan rencana umum pengadaan barang dan jasa pada website.





Kelompok Sasaran:  
Pemerintah Provinsi Jawa Barat

**6. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat.**

Indikator Outcome :

Dimanfaatkannya dokumen hasil pemeriksaan kasus sebagai bahan laporan/informasi ke atasan dan masyarakat.

Indikator Kinerja :

- a) Monitoring tindak lanjut penyelesaian kasus pengaduan masyarakat.
- b) Mengklarifikasi dan mengkaji surat pengaduan masyarakat yang masuk.

Kelompok Sasaran:  
Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat  
Pemerintah Provinsi Jawa Barat

**7. Kegiatan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Kebijakan Pengawasan dan Rencana Kerja Pengawasan**

Indikator Outcome :

- a) Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan di Jawa Barat dan meningkatnya kualitas pelaksanaan hasil pengawasan
- b) Pemanfaatan PKPT dan dokumen hasil perencanaan sebagai bahan menyusun perencanaan yang lebih sinergis.

Indikator Kinerja :

- a) Penyusunan PKPT
- b) Penyusunan Renstra Tahun 2013-2018
- c) Penyusunan dan perbaikan SP, POP, DMP Inspektorat, Kode Etik dan Telaahan Sejawat
- d) Penyusunan Kebijakan Pengawasan Jangka Menengah/Rencana Induk Pengawasan

Kelompok Sasaran :  
a) Inspektorat Provinsi Jawa Barat.



- b) Inspektorat Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.
- c) Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

#### **8. Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Pengawasan**

Indikator Outcome :

Meningkatnya kualitas dan kompetensi Inspektorat dan aparat pengawasan di dalamnya.

Indikator Kinerja :

Pelaksanaan Bimbingan Teknik :

- a) Bimtek Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi.
- b) Bimtek Reviu SAKIP.
- c) Bimtek Laporan Keuangan Berbasis Akrua.
- d) Bimtek Penulisan Pelaporan Hasil Audit.

Kelompok Sasaran :

Aparat Inspektorat Provinsi Jawa Barat.

#### **9. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan**

Indikator Outcome :

Meningkatnya profesionalisme aparatur

Indikator Kinerja :

- a) Pelaksanaan Sosialisasi SPIP Provinsi Jawa Barat
- b) Pelaksanaan Rapat Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi Kepala OPD Provinsi Jawa Barat

Kelompok Sasaran :

- a) Satgas SPIP Provinsi Jawa Barat
- b) Kepala OPD Provinsi Jawa Barat

#### **10. Kegiatan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008**

Indikator Outcome :

Meningkatnya proporsi OPD yang bersertifikasi ISO 9001:2008

Indikator Kinerja :

- a) Dilaksanakannya Penyusunan ISO 9001:2008 SOP
- b) Dilaksanakannya Penerapan ISO 9001:2008 SOP



Kelompok Sasaran :

Aparat Pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Barat

**11. Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur Inspektorat Provinsi Jawa Barat**

Indikator Outcome :

Meningkatnya profesionalisme aparatur

Indikator Kinerja :

- c) Biaya diklat penjenjangan fungsional
- d) Bantuan Kontribusi Diklat Teknis, Seminar, Bimtek, Lokakarya, Workshop, Sosialisasi
- e) Bantuan fasilitasi kegiatan kerohanian
- f) Bantuan biaya penggantian resep, perawatan dan general check up
- g) Bantuan Biaya kesenian.
- h) Bantuan pakaian seragam dan olah raga

Kelompok Sasaran :

Aparat Inspektorat Provinsi Jawa Barat

**12. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Inspektorat Provinsi Jawa Barat**

Indikator Outcome :

Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional kantor Inspektorat Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya.

Indikator Kinerja:

Penyelenggaraan administrasi perkantoran

Kelompok Sasaran:

Inspektorat Provinsi Jawa Barat

**13. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran**

Indikator Outcome :

Dimanfaatkannya hasil pengadaan sarana dan prasarana sehingga menunjang peningkatan kinerja

Indikator Kinerja :



Peningkatan Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, dengan :

- a) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- b) Penataan Sarana Kantor;
- c) Pengadaan Konstruksi Jaringan Air, Pemagaran, Rehab Masjid dan Ruang Arsip

Kelompok Sasaran :

Inspektorat Provinsi Jawa Barat

#### **14. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran**

Indikator Outcome :

Meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana operasional Inspektorat Provinsi Jawa Barat

Indikator Kinerja:

- a) Pemeliharaan gedung perkantoran
- b) Pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan

Kelompok Sasaran :

Inspektorat Provinsi Jawa Barat

#### **15. Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Inspektorat Provinsi Jawa Barat**

Indikator Outcome :

Meningkatkan akuntabilitas Inspektorat

Indikator Kinerja:

- a) Revisi RENSTRA
- b) Rencana Kerja (Renja)/RKT
- c) RKA/DPA
- d) Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- e) Laporan Kegiatan dan Pertanggungjawaban (LKPJ)
- f) Laporan Evaluasi Kinerja
- g) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Inspektorat (LPPD)
- h) Laporan Rutin Keuangan (bulanan, triwulanan, tahunan)



Kelompok Sasaran :  
Inspektorat Provinsi Jawa Barat

### **5.3. Pendanaan Program/Kegiatan**

Program dan Kegiatan Inspektorat Provinsi Jawa Barat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

